

# Pengembangan Pengukuran Daya Saing dengan *Metodologi World Economic Forum (WEF)* untuk Tingkat Propinsi Jawa Barat: Hasil Pengukuran dan Identifikasi Faktor Kunci

Dwi Larso

Center for Innovation, Entrepreneurship, and Leadership (CIEL)

Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)

• Institut Teknologi Bandung (ITB)

dan

Ketua LP3E Kadin Jawa Barat<sup>1</sup>

## Abstrak

Pengukuran daya saing suatu negara telah populer dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu pihak tersebut adalah World Economic Forum/WEF yang menerbitkan Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index, GCI) dari ratusan negara dan merangkingnya. Peringkat ini sering dijadikan oleh suatu negara untuk melihat posisinya dan melakukan perbaikan-perbaikan di dalam menghadapi persaingan dunia yang makin mengglobal. Tulisan ini mencoba mengikuti dan memodifikasi metodologi WEF untuk dimanfaatkan dalam mengukur daya saing pada level propinsi. Sebagai langkah awal, pada tahun 2006 dilakukan pengukuran daya saing di Jawa Barat dan diidentifikasi faktor kunci yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat. Hasil pengukuran menyatakan bahwa faktor kunci yang perlu segera diperbaiki adalah pada bidang Kesehatan dan Pendidikan Dasar, Institusi, dan Infrastruktur. Untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, diusulkan program-program perbaikan di ketiga bidang tersebut. Beberapa program diantaranya adalah pendidikan GRATIS sampai tingkat sekolah menengah atas, program kesehatan bagi Wanita hamil, Ibu menyusui, Bayi, dan Anak di bawah lima tahun (Program WIBA), efisiensi birokrasi dan pemberantasan korupsi dan kolusi, dan perbaikan infrastruktur jalan raya, pelabuhan, bandar udara, dan telekomunikasi.

Kata kunci: daya saing, metodologi WEF, factor kunci, Jawa Barat

50

<sup>1</sup> Studi ini didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, Program SENADA-USAID, dan CIEL SBM-ITB. Pengolahan data dibantu oleh Jauhar Anwar, MBA

## 1. Latar Belakang

"Kita mustahil bisa memperbaiki sesuatu kalau kita tidak bisa mengukurnya!"

Pengukuran daya saing suatu negara telah menjadi agenda populer bagi berbagai institusi di dunia. Hasil pengukuran ini seringkali menjadi bahan acuan/referensi, wacana diskusi, masukan, maupun tolok ukur keberhasilan (atau ketidakberhasilan?) bagi berbagai kalangan seperti pengamat ekonomi, pelaku ekonomi/bisnis, calon investor, pemerintahan, peneliti, akademisi, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Di berbagai media massa dikabarkan bahwa daya saing Indonesia menurut versi *World Economic Forum (WEF)* membaik, meningkat dari peringkat 69 (dari 107 negara) ke peringkat 50 (dari 125 negara) (*Pikiran Rakyat, Kompas, Jum'at - 22 September 2006*). Sebagian pihak tentunya dengan bangga akan mengacu hasil tersebut sebagai suatu keberhasilan. Sebagian lain dengan hati-hati mengingatkan kita apakah peningkatan peringkat tersebut mencerminkan keadaan dunia usaha di lapangan yang sesungguhnya.

Apa pun respons/tanggapannya, angka hasil pengukuran tersebut telah (1) memberi gambaran tentang bagaimana status daya saing Indonesia saat ini dibandingkan tahun lalu maupun dibandingkan negara lain dan (2) memberi petunjuk awal tentang variabel apa yang bisa kita perbaiki untuk meningkatkan daya saing kita.

Banyaknya lembaga yang melakukan pengukuran dengan berbagai perbedaan alat ukur juga kadang kala menimbulkan kontroversi. Apalagi, jika hasil yang mereka dapatkan memberikan informasi yang berlawanan. Menurut satu versi peringkat bisa meningkat, namun berdasar versi lain peringkat dikatakan menurun. Hal ini bisa dilihat bahwa menurut versi WEF, peringkat daya saing Indonesia meningkat, tapi menurut versi *International Institute for Management Development* dikatakan menurun. Apalagi, kalau ditelaah lebih jauh ke dalam berbagai variabel yang terlibat, dengan berbagai bobotnya, tentunya akan mudah menimbulkan perbedaan interpretasi. Contohnya, pembobotan variabel makro yang lebih besar dibanding variabel mikro ditengarai sebagai salah satu penyebab meningkatnya peringkat daya saing Indonesia versi WEF. Kondisi sektor riil yang masih terpuruk pun mendukung keraguan tersebut (*Basri, F., Kompas, Senin - 25 September 2006*).

Hal ini bisa dipahami karena pengukuran daya saing melibatkan banyak variabel dan membutuhkan banyak data dari banyak sumber. Di satu sisi, banyak variabel, data, dan sumber memang dibutuhkan untuk menggambarkan status daya saing suatu negara/daerah, namun di sisi lain semakin banyak variabel, data, dan sumber akan semakin banyak usaha diperlukan untuk menginterpretasikan daya saing secara lebih tepat. Pemahaman, ketulusan, dan keinginan untuk meningkatkan daya saing diperlukan untuk mampu mengambil hikmah, sesuatu yang positif, dari berbagai laporan daya saing yang ada. Dari situ, upaya perbaikan daya saing bisa dimulai. Perbaikan daya saing ini pada gilirannya akan memberikan perbaikan kesejahteraan bagi penduduknya.

Penelitian dan studi daya saing bisa berbasis negara/daerah, sektor industri, atau produk. Berbagai studi yang disebut di atas melibatkan pengukuran dan perbandingan status daya saing antar negara.

Bisakah dilakukan untuk skala propinsi? Kenapa tidak?! Iklim usaha di suatu propinsi akan dipengaruhi kondisi khas (potensi, kebijakan, demografi, teknologi, dan banyak faktor lain) dari daerah tersebut yang akan menentukan daya saing propinsi tersebut. Studi ini memfokuskan dalam pengukuran daya saing Jawa Barat. Tidak diketahui apakah Propinsi Jawa Barat merupakan yang pertama melakukannya di Indonesia.

Tujuan dari studi ini belum lah untuk membandingkannya dengan propinsi lain di Indonesia, karena memang belum ada data dari propinsi lain. Tentunya, bukan pula dimaksudkan untuk membandingkannya dengan negara lain, walau dimungkinkan. Studi ini terutama dirancang untuk mengambil 'foto' atas kondisi daya saing Jawa Barat dengan tiga (3) tujuan, yaitu:

- (1) Sebagai basis data untuk memonitor perkembangan dari waktu ke waktu,
- (2) Identifikasi faktor kunci,
- (3) Evaluasi untuk perbaikan.

Studi ini mengikuti metodologi WEF dengan pertimbangan bahwa metode ini cukup dikenal di Indonesia. WEF juga telah menyempumakan metode pengukurannya dengan lebih komprehensif melibatkan banyak variabel, dan mulai tahun 2006 ini telah menggunakannya dengan utuh.

## 2. Model Pengukuran Daya Saing versi *World Economic Forum/WEF*

Pendekatan baru pengukuran daya saing versi WEF tahun 2005-2006 menggunakan *Global Competitiveness Index (GCI)*. Angka GCI ini dihasilkan dari pengolahan atas 9 faktor yang disebut pilar. Setiap pilar terdiri atas beberapa variabel, kemudian setiap variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa sub-variabel. Data yang dipergunakan mencakup data primer dari survei, maupun data sekunder. Di bawah ini adalah 9 pilar tersebut dan variabel-variabel yang membentuknya.

Tabel 1. Sembilan (9) Pilar Pengukuran Daya Saing versi WEF

Pilar	Variabel
1. Institusi	A. Institusi Publik B. Institusi Swasta
2. Infrastruktur	Kereta api, pelabuhan, bandara, listrik, dan telepon
3. Makroekonomi	Surplus/deficit anggaran pemerintah, tabungan, inflasi, rentang suku bunga, hutang pemerintah, kurs. Government surplus/deficit (hard data)
4. Kesehatan dan Pendidikan Dasar	A. Kesehatan B. Pendidikan dasar
5. Pelatihan dan Pendidikan Lanjut/Tinggi	A. Kuantitas pendidikan B. Kualitas pendidikan C. Pelatihan kerja/magang
6. Efisiensi Pasar	A. Pasar barang: distorsi, kompetis, dan ukuran B. Pasar tenaga kerja: fleksibilitas dan efisiensi C. Pasar uang
7. Kesiapan Teknologi	Kesiapan teknologi, penerapan teknologi, aturan terkait ICT, PMA dan transfer teknologi, telepon seluler, pengguna internet, computer
8. Kecanggihan Bisnis	A. Jejaring dan industri pendukung B. Kecanggihan operasi dan strategi perusahaan
9. Inovasi	Kualitas lembaga riset, budget untuk R&D, kerjasama industri-universitas, belanja pemerintah untuk produk teknologi canggih, ketersediaan ilmuwan dan insinyur, paten, perlindungan HaKI, kapasitas inovasi.



Kesembilan pilar di atas kemudian dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama sebagai berikut:

Sub-indeks Persyaratan Dasar (*Stage 1: Factor-driven*)

- Institusi (pilar 1)
- Infrastruktur (pilar 2)
- Makroekonomi (pilar 3)
- Kesehatan dan Pendidikan Dasar (pilar 4)

Sub-indeks Penggerak Efisiensi (*Stage 2: Efficiency-driven*)

- Pelatihan dan Pendidikan Lanjut/Tinggi (pilar 5)
- Efisiensi Pasar (pilar 6)
- Kesiapan Teknologi (pilar 7)

Sub-indeks Inovasi dan Kecanggihan (*Stage 3: Innovation-driven*)

- Kecanggihan Bisnis (pilar 8)
- Inovasi (pilar 9)

Untuk mendapatkan indeks daya saing GCI, ketiga sub-indeks tadi dibobot sesuai pendapatan per kapita masing-masing negara/daerah. Indonesia dan Jawa Barat digolongkan ke dalam *Factor-driven stage* karena memiliki pendapatan per kapita di bawah US\$2,000. Dengan demikian, bobot yang digunakan adalah Sub-indeks Persyaratan Dasar (50%), Sub-indeks Penggerak Efisiensi (40%), dan Sub-indeks Inovasi dan Kecanggihan (10%). Bobot lengkap untuk berbagai kelas ekonomi (stage) tertera pada tabel berikut.

Tabel 2. Pembobotan Indeks Daya Saing versi WEF

Bobot	Persyaratan Dasar	Penggerak Efisiensi	Inovasi dan Kecanggihan
<i>Factor-driven stage</i>	50%	40%	10%
<i>Efficiency-driven stage</i>	40%	50%	10%
<i>Innovation-driven stage</i>	30%	40%	30%

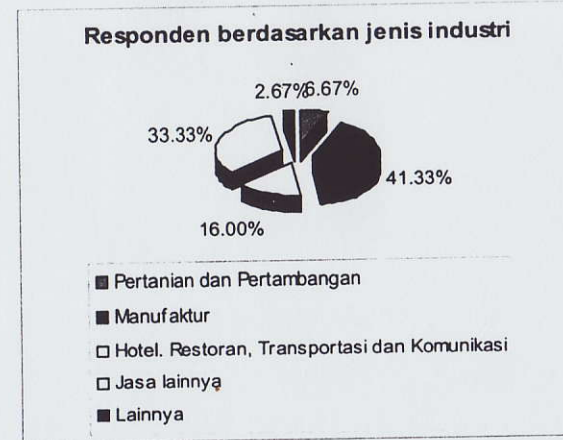
### 3. Hasil Pengukuran Daya Saing Jawa Barat

Pengukuran indeks daya saing di tingkat Propinsi Jawa Barat untuk yang pertama ini dilakukan pada tahun 2006. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, data diambil baik dari data primer melalui survei maupun data sekunder. Data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, publikasi pemerintah, dan sumber lainnya. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui survei yang dinamakan Survei Opini Eksekutif (*Sumber: WEF, Global Competitiveness Report, 2005-2006*).

Kuesioner survei ini disebar untuk diisi oleh para eksekutif, termasuk pemilik usaha maupun manajemen puncaknya. Sampel diambil dengan mempertimbangkan keterwakilan antar sektor industri, sebaran geografi, ukuran, dan kepemilikan perusahaan. Dari survei terkumpul data dari 75 eksekutif berbagai perusahaan yang tersebar di Jawa Barat.

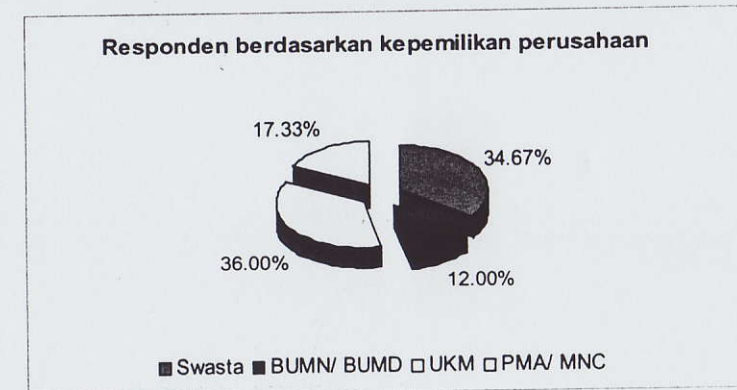
### 3.1 Profil Responden/Perusahaan

Perusahaan yang disurvei mewakili berbagai sektor industri seperti manufaktur, pertanian dan pertambangan, hotel, restoran, transportasi, komunikasi, dan jasa lainnya. Komposisi masing-masing sektor industri bisa dilihat pada gambar berikut.



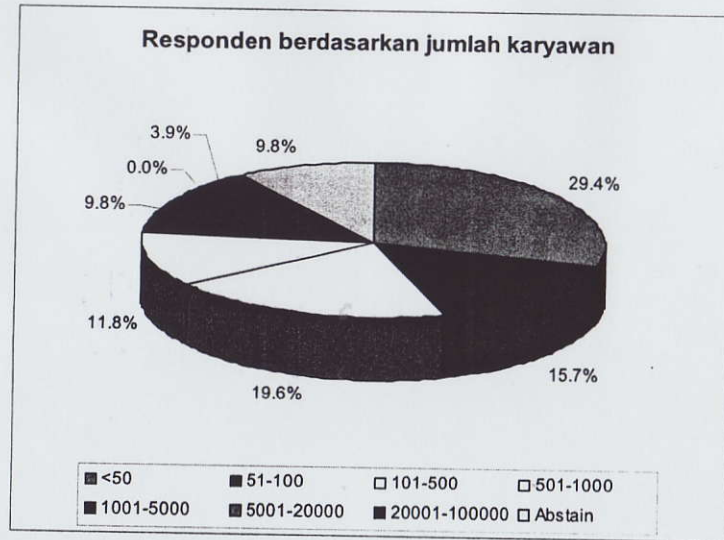
Gambar 1. Profil Responden berdasar Jenis Industri

Dari kepemilikannya, terlihat bahwa dari 75 perusahaan yang disurvei, 36% adalah milik UKM, 35% milik Swasta Nasional, 17% milik PMA/Multi-Nasional, dan 12% adalah milik Negara/Daerah.



Gambar 2. Profil Responden berdasar Kepemilikan

Dari Gambar 3 di bawah, terlihat bahwa perusahaan yang disurvei mencakup berbagai ukuran perusahaan berdasar jumlah karyawan. Perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 50 merupakan kelompok terbesar (29%), sedangkan perusahaan dengan jumlah karyawan melebihi 20.000 merupakan kelompok terkecil (4%).



Gambar 3. Profil Responden berdasar Jumlah Karyawan

### 3.2 Indeks Daya Saing, GCI, untuk Jawa Barat

Indeks daya saing, GCI, Jawa Barat secara keseluruhan mendapat skor 3,67 (dari skala 7). Skor terendah didapat pada Pilar Infrastruktur (2,63). Skor tertinggi tercatat untuk Pilar Kesehatan dan Pendidikan Dasar (5,12). Tabel berikut menunjukkan skor untuk seluruh pilar dari indeks daya saing.

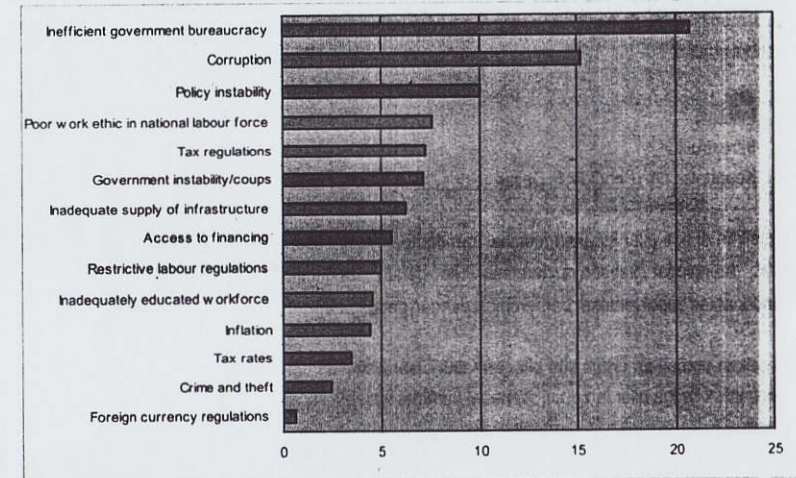
Tabel 3. Indeks Daya Saing Jawa Barat 2006

Variabel	Rank	Skor
Indeks Daya Saing, GCI	85	3,67
Persyaratan Dasar	95	3,94
Institusi	92	3,13
Infrastruktur	89	2,63
Makroekonomi	34	4,86
Kesehatan dan Pendidikan Dasar	109	5,12
Penggerak Efisiensi	78	3,37
Pelatihan dan Pendidikan Lanjut	77	3,63
Efisiensi Pasar	82	3,75
Kesiapan Teknologi	81	2,71
Inovasi dan Kecanggihan	66	3,53
Kecanggihan Bisnis	75	3,86
Inovasi	53	3,21

Sekadar untuk membandingkan, bila disandingkan dengan peringkat negara-negara yang disurvei WEF dalam laporan tahun 2005-2006, maka Jawa Barat akan menempati ranking 85 dari 118 'negara'. Walau mendapat skor tertinggi, Pilar Kesehatan dan Pendidikan Dasar mendapatkan peringkat terendah dibanding pilar-pilar lainnya. Selain itu, Pilar Institusi dan Pilar Infrastruktur juga menempati peringkat rendah. Pilar-pilar yang berada di sub-indeks Penggerak Efisiensi dan subindeks Inovasi dan Kecanggihan menempati peringkat yang relatif lebih baik, minimal lebih baik dari peringkat total (85).

### 3.3 Masalah Utama dalam Menjalankan Bisnis di Jawa Barat

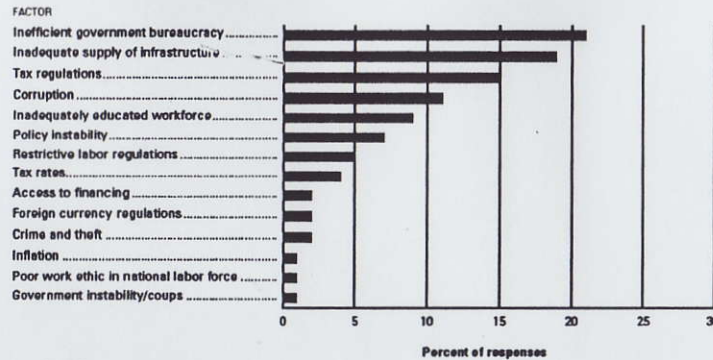
Hasil perhitungan indeks daya saing tersebut di atas diuji lebih lanjut dengan informasi yang didapat dari persepsi responden tentang masalah utama yang dihadapi dalam menjalankan bisnis di Jawa Barat. Skor rendah pada Pilar Institusi diperkuat oleh temuan bahwa masalah paling utama dalam menjalankan bisnis di Jawa Barat adalah *birokrasi yang tidak efisien* dan *korupsi*. Skor yang rendah pada Pilar Infrastruktur juga diperkuat dengan temuan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai masih menjadi masalah utama di Jawa Barat. Gambar 4 menunjukkan masalah-masalah utama yang ada di Jawa Barat diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ternyata, masalah-masalah utama yang dihadapi dunia usaha di Jawa Barat serupa dengan yang dihadapi di Indonesia secara umum, yaitu masalah birokrasi dan infrastruktur seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 4. Masalah Utama dalam Menjalankan Bisnis di Jawa Barat



### The Most Problematic Factors for Doing Business



Gambar 5. Masalah Utama dalam Menjalankan Bisnis di Indonesia  
(Sumber: WEF, Global Competitiveness Report, 2005-2006)

#### 4. Identifikasi Faktor Kunci

Dari identifikasi pilar-pilar yang bermasalah, minimal terdapat 3 pilar yang perlu penanganan segera untuk memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan daya saing Jawa Barat. Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Institusi
2. Infrastruktur
3. Kesehatan dan Pendidikan Dasar

Perbaikan di tiga pilar ini akan memberikan dampak yang besar bagi peningkatan daya saing Jawa Barat, mengingat ketiganya termasuk ke dalam sub-indeks PERSYARATAN DASAR yang mendapatkan bobot terbesar bagi propinsi dengan pendapatan per kapita kurang dari US\$ 2.000.

Perbaikan-perbaikan untuk tiga pilar tersebut bisa dilakukan dengan melihat variabel-variabel yang membentuk ketiga pilar tersebut. Variabel-variabel tersebut secara lengkap ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Faktor-Faktor Kunci untuk Perbaikan

Pilar 1. Institusi	
A. Institusi Publik	
1.	Hak Kepemilikan ( <i>Property rights</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak kepemilikan</li> </ul>
2.	Etika dan Korupsi ( <i>Ethics and Corruption</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggelapan dana publik</li> <li>• Kepercayaan publik pada politisi</li> </ul>
3.	Pengaruh yang tidak semestinya ( <i>Undue influence</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian proses pengadilan (<i>Judicial independence</i>)</li> <li>• Favoritisme dalam keputusan-keputusan pejabat pemerintahan</li> </ul>
4.	Inefisiensi Pemerintahan ( <i>red tape, bureaucracy and waste</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemborosan belanja pemerintah</li> <li>• Beban regulasi pemerintah</li> </ul>
5.	Kecelakaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongkos bisnis dari terorisme</li> <li>• Kepercayaan pada Jasa Kepolisian</li> <li>• Ongkos bisnis dari kejahatan dan kerusuhan</li> <li>• Mafia, Kejahatan terorganisasi/<i>Organized crime</i></li> </ul>
B. Institusi Swasta	
1.	Etika perusahaan/ <i>Corporate ethics</i>
2.	Perilaku etis dari perusahaan
3.	Akuntabilitas perusahaan/ <i>Corporate accountability</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efikasi dari dewan perusahaan/<i>Efficacy of corporate boards</i></li> <li>• Perlindungan pada pemegang saham minoritas</li> <li>• Standar pelaporan dan auditing.</li> </ul>
Pilar 2. Infrastruktur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas umum dari infrastruktur</li> <li>• Pembangunan infrastruktur kereta api</li> <li>• Kualitas infrastruktur pelabuhan</li> <li>• Kualitas infrastruktur transportasi udara</li> <li>• Kualitas suplai tenaga listrik</li> <li>• Infrastruktur telepon (<i>hard data</i>)</li> </ul>	
Pilar 3. Kesehatan dan Pendidikan Dasar	
A. Kesehatan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impak jangka menengah pada bisnis dari malaria</li> <li>• Impak jangka menengah pada bisnis dari TBC (<i>tuberculosis</i>)</li> <li>• Impak jangka menengah pada bisnis dari HIV/AIDS</li> <li>• Angka kematian bayi (<i>hard data</i>)</li> <li>• Harapan hidup pada kelahiran/<i>Life expectancy at birth (hard data)</i></li> <li>• <i>Tuberculosis prevalence (hard data)</i></li> <li>• <i>Malaria prevalence (hard data)</i></li> <li>• <i>HIV/AIDS prevalence (hard data)</i></li> </ul>	
B. Pendidikan Primer	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Gross primary enrollment (hard data)</i></li> </ul>	

#### 5. Evaluasi untuk Perbaikan

Informasi dari hasil pengukuran indeks daya saing Propinsi Jawa Barat sangat berguna untuk dianalisis dan dievaluasi dalam rangka mengembangkan program-program perbaikan. Program-program perbaikan ini akan difokuskan pada faktor-faktor kunci yang telah diidentifikasi untuk secara signifikan meningkatkan indeks daya saing Propinsi Jawa Barat.



### 5.1 Program Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar mendapatkan peringkat terendah dari seluruh pilar yang lain. Hal ini membuat pendidikan dasar merupakan prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Mayoritas atau di atas 50% penduduk Jawa Barat masih berpendidikan dasar: lulus SD, tidak lulus SD, atau tidak pernah sekolah sama sekali. Ternyata, statistik ini serupa dengan penduduk Indonesia secara umum. Angka ini harus segera diperbaiki untuk meningkatkan daya saing secara signifikans.

Untuk meningkatkannya, masyarakat Jawa Barat harus sepakat bahwa pendidikan dasar adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga propinsi. Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat harus menyediakan seluruh prasarana dan sarana untuk pendidikan dasar dan menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah GRATIS untuk seluruh warga. Hal ini adalah konsekuensi logis dari kesepakatan bahwa pendidikan dasar adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga propinsi.

Kalau ditelaah lebih lanjut, pendidikan dasar formal sampai tingkat sekolah menengah atas (*high school*) adalah syarat minimal bagi seseorang untuk bisa berperan positif dan aktif sebagai warga propinsi yang baik. Hal ini juga diperkuat kenyataan bahwa mereka sebagian besar masih berusia anak-anak (belum dewasa). Adalah hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dari orang dewasa dan masyarakatnya. Alangkah mulianya kalau Pemerintahan Propinsi dengan seluruh sumber daya yang ada di masyarakatnya berani menyediakan pendidikan GRATIS sampai tingkat sekolah menengah atas. Dengan demikian, tidak hanya tingkat pendidikan meningkat, namun juga masyarakat yang berdaya akan ikut berperan aktif dan positif untuk memecahkan setiap persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Tentunya peningkatan angka pendidikan ini harus dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas pendidikan.

### 5.2 Program Kesehatan

Selain masalah kesehatan umum seperti malaria, TBC, dan HIV/AIDS, perhatian utama harus diberikan pada kesehatan wanita hamil, ibu menyusui, dan bayi, dan anak di bawah lima tahun (balita). Program Wanita hamil, Ibu menyusui, Bayi, dan Anak di bawah lima tahun (WIBA) ini untuk meyakinkan bahwa setiap anak yang terlahir di propinsi ini akan mendapat gizi dan pelayanan kesehatan yang baik demi pertumbuhan otak dan kemampuan lainnya yang akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya.

Pemerintahan Propinsi dengan seluruh sumber daya yang ada di masyarakatnya harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang gratis bagi penduduk yang tidak mampu secara ekonomi atau terjangkau bagi kalangan lainnya untuk suksesnya program ini. Program WIBA ini mencakup minimal:

- Konsultasi kehamilan dan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil
- Konsultasi dan bantuan perbaikan gizi bagi WIBA
- Pelayanan kesehatan dan imunisasi bagi WIBA

### 5.3 Program Perbaikan Institusi

Walau faktor institusi meliputi berbagai lembaga baik pemerintahan maupun swasta, namun karena skornya yang rendah, maka program perbaikan harus difokuskan pada perbaikan institusi pemerintahan. Program perbaikan institusi ini minimal meliputi:

- efisiensi birokrasi,
- pemberantasan korupsi dan kolusi dalam pengambilan keputusan publik,
- peningkatan pelayanan kepolisian dan keamanan,
- pemberantasan mafia, preman, dan kejahatan terorganisasi, dan
- peningkatan kepercayaan publik pada politisi dan lembaga peradilan.

Propinsi Jawa Barat dengan berbagai permasalahannya di sektor ini harus berusaha lebih keras untuk memecahkannya dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Setiap perbaikan yang dilakukan akan memberi dampak yang positif bagi perbaikan persepsi dunia usaha akan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing daerah.

### 5.4 Program Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur ini memang tidak hanya masalah yang bisa dipecahkan oleh masyarakat di propinsi tertentu, namun juga oleh berbagai pihak termasuk lembaga pemerintahan pusat dan BUMN. Contohnya, seperti infrastruktur kereta api atau suplai tenaga listrik yang dikelola oleh BUMN. Namun, Pemerintahan Jawa Barat bisa melakukan banyak hal lain seperti peningkatan kualitas infrastruktur jalan raya yang kondisinya di Jawa Barat segera perlu ditingkatkan. Pembangunan pelabuhan laut, bandar udara, dan infrastruktur transportasi/kargo perlu segera direalisasikan sesuai kebutuhan yang meningkat. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi juga perlu dilakukan supaya layanan telepon dan internet makin terjangkau bagi masyarakat umum. Hal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat umum dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan demi peningkatan kualitas hidup mereka.

## 6. Kesimpulan

Sebagai penutup, diingatkan bahwa tujuan studi pengukuran daya saing ini belum lah untuk membandingkannya dengan propinsi lain di Indonesia atau pun negara lain. Tapi, lebih untuk memotret kondisi daya saing Jawa Barat di tahun 2006.

Dari pengukuran ini, diperoleh landasan/acuan untuk melakukan perbaikan demi peningkatan daya saing Propinsi Jawa Barat. Seluruh tiga tujuan studi ini telah terpenuhi dengan tersedianya basis data tahun 2006 untuk memonitor perbaikan dari waktu ke waktu dan teridentifikasinya faktor kunci yang perlu segera diperbaiki. Selanjutnya, proses monitoring bisa dicapai bila kegiatan pengukuran ini dilaksanakan secara rutin, setiap tahun atau dua tahun sekali.

Akhir kata, penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa peran serta lebih dari 75 pelaku usaha di Jawa Barat dalam mengisi kuesioner survei. Hasil studi ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para sponsor, yaitu Disperindag Jabar, Program SENADA-USAID, dan CIEL SBM-ITB. Terima kasih.

## Daftar Pustaka

- Basri, Faisal. *Analisis Ekonomi: Tentang Daya Saing Kita*. Kompas, Senin - 25 September 2006.
- Kompas. *Daya Saing Membaik: Indonesia Menduduki Peringkat Ke-50 dari 125 Negara*. Jum'at - 22 September 2006.
- Pikiran Rakyat. *Daya Saing RI Meningkat: Berada di Peringkat 50 dari 125 Negara*. Jum'at - 22 September 2006.
- World Economic Forum (WEF). *Global Competitiveness Report, 2005-2006*.